

**PENGARUH BELANJA MODAL DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DIMODERASI OLEH TINGKAT KESEHATAN
KEUANGAN**

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

Safira Rahmi Adiyar

NIM. 31402400043

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2025

SKRIPSI**PENGARUH BELANJA MODAL DAN TINGKAT
KETERGANTUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
JAWA TENGAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN
DIMODERASI OLEH TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN**

Disusun Oleh :
Safira Rahmi Adiyar
NIM : 31402400043

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan
selanjutnya dapat diajukan kepada Ketua Program
Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 13 Agustus 2025

Dosen Pembimbing,

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., Ph.D

NIK. 211403012

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**PENGARUH BELANJA MODAL DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DIMODERASI OLEH TINGKAT KESEHATAN
KEUANGAN**

Disusun Oleh :
Safira Rahmi Adiyar
NIM : 31402400043

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan
selanjutnya dapat diajukan kepada Ketua Program
Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 13 Agustus 2025

Ketua Program Studi,

Dosen Pembimbing,



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., Ph.D

NIK. 211403012

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., Ph.D

NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Safira Rahmi Adiyar

NIM : 31402400043

Program Studi : RPL S-1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul :

“Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Terhadap Kinerja Keuangan Dimoderasi oleh Tingkat Kesehatan Keuangan”.

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 13 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Safira Rahmi Adiyar

NIM. 31402300043

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menyertakan kesehatan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel moderasi yang diukur menggunakan rasio fleksibilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda dan *moderated regression analysis* (MRA). Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 25. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2022-2024. Sampel penelitian menggunakan sampling jenuh. Data yang digunakan berupa LRA dan Neraca yang diperoleh melalui LHP yang diterbitkan BPK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara tingkat ketergantungan pada dana transfer pusat berpengaruh negatif. Namun, kesehatan keuangan mampu memperkuat pengaruh positif belanja modal dan memperlemah pengaruh negatif tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan. Hal ini memberikan implikasi bahwa dengan kondisi keuangan pemerintah daerah yang sehat dapat mengoptimalkan efektivitas belanja modal dan/ataupun mengurangi dampak negatif dari ketergantungan fiskal. Penelitian ini memiliki keterbatasan jumlah sampel dan tahun pengamatan, data yang digunakan dalam penelitian hanya mencakup periode setelah pandemi COVID-19. Kemudian, penelitian ini menyarankan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan pengalokasian belanja daerah dan bagi Pemerintah Pusat untuk mendorong kebijakan yang memperkuat kemandirian pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal.

Kata kunci: Belanja Modal, Desentralisasi Fiskal, Kesehatan Keuangan, Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of capital expenditure and dependency level on the financial performance of local governments. This research includes the financial health of local governments as a moderating variable, measured using the flexibility ratio. A quantitative approach was employed with multiple linear regression and moderated regression analysis (MRA). Data processing was conducted using IBM SPSS Statistics version 25. The population in this study consists of regencies and municipalities in Central Java Province for the period 2022–2024. The sample was determined using a saturated sampling technique. The data used include the Budget Realization Report (LRA) and the Balance Sheet obtained from Audit Reports issued by the Audit Board of Indonesia (BPK).

The results of the study show that capital expenditure has no effect on the financial performance of local governments, while fiscal dependency on central government transfers has a negative effect. However, financial health strengthens the positive effect of capital expenditure and weakens the negative effect of fiscal dependency on financial performance. This implies that when local governments have a healthy financial condition, they are able to optimize the effectiveness of capital expenditure and/or reduce the adverse impacts of fiscal dependency.

This study is limited by the number of samples and the observation period, as the data only cover the post-COVID-19 period. Furthermore, the study suggests that local governments should pay greater attention to budget allocation, while the central government should encourage policies that strengthen local government independence in implementing fiscal decentralization.

Keywords: Capital Expenditure, Fiscal Decentralization, Financial Health, Financial Performance, Local Government, Dependency Level

INTISARI

Penelitian ini membahas pengaruh belanja modal dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kesehatan keuangan sebagai variabel moderasi. Di era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri. Namun tingginya ketergantungan fiskal pada transfer pusat serta kurang optimalnya efektivitas belanja modal seringkali menjadi kendala dalam mewujudkan kinerja keuangan yang baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan kesehatan keuangan sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada periode 2022-2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan tingkat ketergantungan fiskal berpengaruh negatif signifikan. Namun, kesehatan keuangan terbukti berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh positif belanja modal serta melemahkan pengaruh negatif tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya kondisi keuangan yang sehat dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.

Namun, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Obyek penelitian hanya terbatas pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2022-2024. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada obyek di luar daerah penelitian karena memiliki karakteristik yang berbeda. Di samping itu, penelitian ini juga tidak dapat menangkap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka panjang karena periode penelitian yang relatif singkat

Implikasi penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas alokasi belanja modal pada sektor-sektor produktif agar mampu memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengurangi tingkat ketergantungan pada dana transfer pusat melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pengelolaan fiskal yang transparan. Bagi pemerintah pusat, perlu memberikan dukungan yang tepat kepada daerah antara lain melalui regulasi dan insentif yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan aparatur, dan penyediaan sistem informasi terintegrasi. Selain itu penting adanya mekanisme pembagian hasil pajak yang adil antara pusat dan daerah untuk mendorong tercapainya kemandirian fiskal.

KATA PENGANTAR

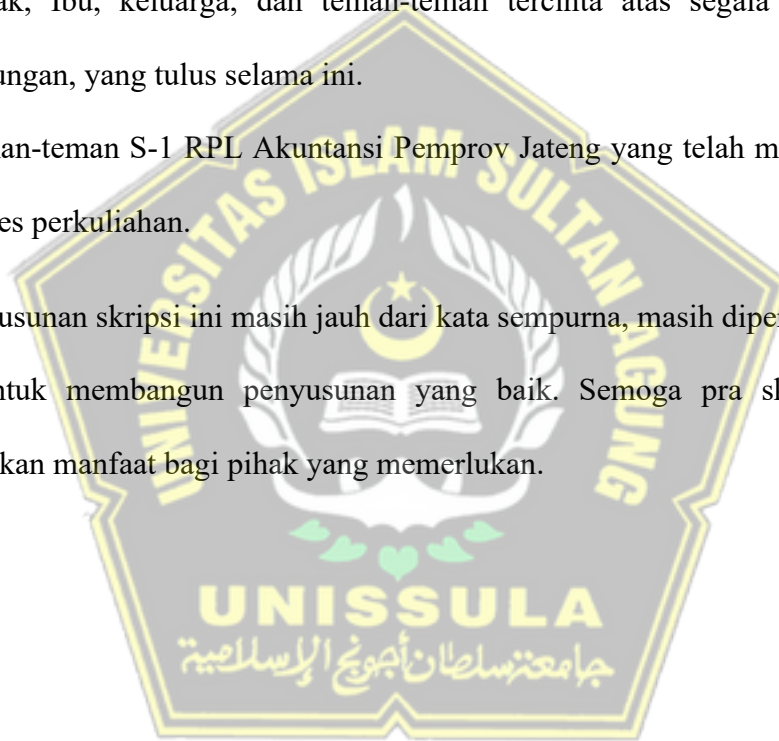
Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan skripsi dengan judul **“Pengaruh Belanja Modal Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Terhadap Kinerja Keuangan Dimoderasi oleh Tingkat Kesehatan Keuangan”**.

Laporan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Selama proses bimbingan proposal skripsi peneliti mendapatkan motivasi, serta dukungan dari pihak lain, oleh sebab itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., Ph.D selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini,
3. Ibu Dr. Sri Anik, SE., M.Si selaku Dosen Reviewer atas bimbingan dan masukan kepada peneliti dalam menyusun skripsi ini.

4. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu sehingga peneliti mendapat pengetahuan yang dapat digunakan kini maupun di masa yang akan datang.
5. Seluruh staf tata usaha dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan proposal penelitian ini hingga selesai,
6. Bapak, Ibu, keluarga, dan teman-teman tercinta atas segala doa, perhatian, dukungan, yang tulus selama ini.
7. Teman-teman S-1 RPL Akuntansi Pemprov Jateng yang telah membantu selama proses perkuliahan.

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih diperlukan saran dan kritik untuk membangun penyusunan yang baik. Semoga pra skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan.



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
INTISARI.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	10
2.1.2 Desentralisasi Fiskal.....	11
2.1.3 Belanja Modal	13
2.1.4 Tingkat Ketergantungan Daerah	15
2.1.5 Kesehatan keuangan.....	16
2.1.6 Kinerja Keuangan.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.3 Pengembangan Hipotesis	21
2.3.1 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	21

2.3.2	Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	22
2.3.3	Kesehatan keuangan Memoderasi Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	23
2.3.4	Kesehatan keuangan Memoderasi Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	25
2.4	Kerangka Penelitian	26
BAB III	METODE PENELITIAN.....	27
3.1	Jenis Penelitian.....	27
3.2	Populasi dan Sampel	27
3.2.1	Populasi.....	27
3.2.2	Sampel.....	28
3.3	Jenis dan Sumber Data	28
3.4	Metode Pengumpulan Data	29
3.5	Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	29
3.6	Teknik Analisis Data	32
3.6.1	Uji Statistik Deskriptif	32
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	32
3.6.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	35
3.6.4	<i>Moderating Regression Analysis (MRA)</i>	36
3.6.5	Uji <i>Goodness of Fit Model</i>	37
3.6.6	Uji Hipotesis	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	40
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data	42
4.3	Pembahasan	62
BAB V	PENUTUP.....	68
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 : Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel III.1 : Sampel Penelitian.....	29
Tabel III.2 : Definisi Operasional Variabel.....	31
Tabel III.3 : Kriteria Pengujian Durbin Watson	34
Tabel IV.1 : Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah	40
Tabel IV.2 : Uraian Sampel Penelitian	42
Tabel IV.3 : Hasil Analisis Deskriptif Statistik	43
Tabel IV.4 : Hasil Uji Normalitas	46
Tabel IV.5 : Hasil Uji Multikolinearitas	49
Tabel IV.6 : Hasil Uji Autokorelasi	50
Tabel IV.7 : Hasil Uji Glejser	52
Tabel IV.8 : Hasil Uji Regresi Linier Berganda	53
Tabel IV.9 : Hasil Uji MRA.....	54
Tabel IV.10 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²) tanpa Interaksi Variabel Moderasi.....	56
Tabel IV.11 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²) dengan Interaksi Variabel Moderasi.....	57
Tabel IV.12 : Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) tanpa Interaksi Variabel Moderasi.....	58
Tabel IV.13 : Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) dengan Interaksi Variabel Moderasi.....	58
Tabel IV.14 : Hasil Uji Hipotesis secara Parsial (Uji-t).....	59
Tabel IV.15 : Ringkasan Hasil Hipotesis.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 : Grafik Perbandingan Sumber Pendapatan Daerah.....	3
Gambar II.1 : Kerangka Penelitian.....	26
Gambarl IV.1 : Hasil Uji Histogram	47
Gambarl IV.2 : Hasil Uji P-Plot.....	48
Gambarl IV.3 : Hasil Uji Heteroskedastisitas	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rincian Data Sampel	75
Lampiran 2 Uji Statistik Deskriptif.....	77
Lampiran 3 Uji Asumsi Klasik	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

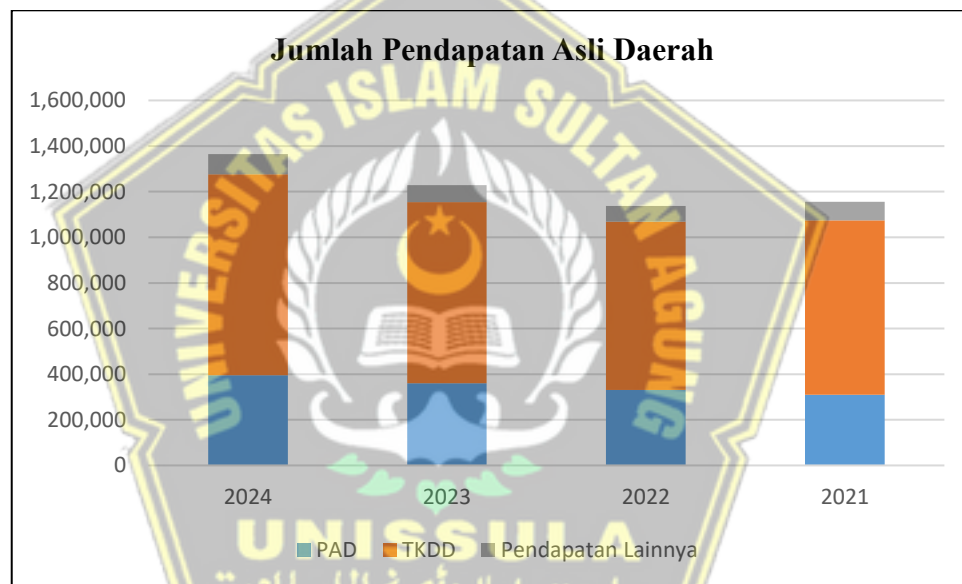
Sejak diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Indonesia menapaki era otonomi daerah yang baru. Hal ini ditunjukkan melalui penyerahan kewenangan yang lebih luas kepada daerah yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia. Penyerahan kewenangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung implikasi fiskal yang signifikan. Desentralisasi fiskal menjadi elemen kunci untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara mandiri. Perkembangan lebih lanjut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 25 Tahun 1999, sebagai upaya penyempurnaan pengaturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pembentukan UU tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan prinsip *money follow function*, yaitu pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. UU tersebut kemudian menjadi landasan penting dalam membangun kapasitas fiskal otonom.

Karakteristik utama suatu daerah yang melaksanakan otonomi menurut Halim (2004) diantaranya: (1) kemampuan keuangan daerah untuk menggali sumber

pendapatan dan mengelolanya sendiri untuk penyelenggaraan pemerintahan dan (2) ketergantungan pada pusat harus seminimal mungkin. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber utama keuangan daerah agar pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya secara lebih independen. Semakin besar kontribusi PAD, maka semakin besar pula ruang gerak dan peranan Pemda dalam pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, tidak semua Pemerintah daerah memiliki tingkat kesiapan fiskal yang setara. Dari hal tersebutlah desentralisasi fiskal memegang peranan yang strategis. Desentralisasi fiskal hadir untuk memperkuat kemandirian daerah dan mewujudkan tujuan otonomi. Agar tujuan tersebut tercapai, pada pelaksanaannya, perlu diimbangi pula oleh kapasitas Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Efektivitas desentralisasi fiskal dalam memperkuat kemandirian daerah masih menghadapi tantangan yang nyata, seperti yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam postur APBD, terdapat tiga sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan terbagi lagi menjadi tiga jenis yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, di tahun 2024 PAD hanya berkontribusi sebesar 28,94% dari total pendapatan daerah sedangkan pendapatan transfer sebesar 64,65% dari total

pendapatan daerah. Pola ketergantungan ini juga terlihat konsisten pada tahun-tahun sebelumnya: 64,64% pada tahun 2023, 64,87% pada tahun 2022, dan 66,07% pada tahun 2021. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Pemerintah daerah menggantungkan keberlangsungan fiskalnya pada transfer dari pemerintah pusat. Hal ini memperlihatkan masih tingginya tingkat ketergantungan, yang mana dapat mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah.



Gambar I.1 :
Grafik Perbandingan Sumber Pendapatan Daerah

Untuk mengukur kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah digunakanlah kinerja keuangan. Menurut Halim (2021), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran yang menggambarkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pengelolaan keuangan sumber daya keuangan oleh Pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja ini mencakup berbagai

aspek seperti kemampuan mengelola pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan secara optimal, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kinerja tersebut, Pemerintah daerah perlu melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan terkait kinerja keuangan. Kinerja keuangan itu sendiri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti PAD, dana perimbangan, dan belanja modal (Digidowiseiso et al., 2022). Kesemuanya berperan strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk menerapkan otonomi daerah. Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Kabupaten/kota ini diharapkan mampu menggali potensi lokalnya guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong kemandirian fiskal dan menekan tingkat ketergantungan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan belanja yang lebih efisien. Pada tahun 2023 Jawa Tengah mencatatkan realisasi PAD sebesar 99,95%, realisasi transfer dari pemerintah pusat sebesar 101,32%, dan realisasi belanja modal 95,58%. Meskipun angka tersebut tergolong tinggi, namun belum tentu sejalan dengan tingkat efektivitas kinerja keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan tingkat

ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan dengan karakteristik Pemerintah daerah dan cenderung mudah diidentifikasi oleh berbagai pemangku kepentingan. Belanja modal secara langsung terhubung dengan pembangunan infrastruktur dalam suatu daerah, yang melibatkan alokasi anggaran untuk memperoleh aset jangka panjang, baik berupa aset berwujud maupun tak berwujud yang memiliki nilai manfaat yang panjang. Pada umumnya, belanja ini digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat (Nuryani & Firmansyah, 2020).

Selain itu, tingkat ketergantungan Pemerintah daerah pada transfer dari pemerintah pusat sangat erat kaitannya dengan kinerja keuangan daerah. Meskipun desentralisasi fiskal telah diterapkan selama lebih dari 20 tahun, banyak pemerintah daerah yang masih mengandalkan dana transfer untuk membiayai berbagai program pembangunan, terutama di wilayah-wilayah dengan kapasitas fiskal yang terbatas. Belum optimalnya PAD menjadi salah satu penyebab utama tingginya ketergantungan tersebut, sehingga dana transfer menjadi sumber pendapatan dominan dalam APBD. Sejumlah penelitian yang dilakukan oleh Maulina et al. (2021), Nauw & Riharjo (2021), Padang & Padang (2024), serta Setiani & Ismunawan (2022) menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah. Dana perimbangan dianggap memberikan stabilitas keuangan,

menjamin pendanaan untuk proyek-proyek penting, dan membantu daerah memenuhi kebutuhan anggaran terutama ketika kontribusi PAD masih rendah.

Namun demikian terdapat beberapa penelitian lain yang menemukan bahwa ketergantungan yang tinggi justru berdampak negatif pada kinerja keuangan Pemerintah daerah (Adinata & Efendi, 2022; Digdowiseiso et al., 2022; Firmansyah, 2024; Novita & Arza, 2024). Ketergantungan yang tinggi pada transfer dana dari pemerintah pusat dianggap mengurangi insentif daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli, melemahkan inisiatif pengelolaan keuangan secara mandiri, dan menciptakan ketergantungan yang berkelanjutan sehingga menghambat kemandirian fiskal. Sementara itu, Nauw & Riharjo (2021) menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengelola dana yang diterima secara efektif dan efisien sehingga ketergantungan pada transfer pusat tidak menjadi faktor utama yang menentukan kinerja keuangan mereka.

Selain itu, penelitian ini menggunakan kesehatan keuangan sebagai variabel moderasi dalam pengaruh belanja modal dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah. Kemampuan Pemerintah daerah dalam membiayai seluruh pengeluarannya merupakan bentuk kesehatan keuangan (Muñoz et al., 2016). Pemerintah daerah yang memiliki sumber daya keuangan yang memadai dapat memenuhi semua komitmennya sambil tetap memprioritaskan kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi utangnya

setelah membiayai pengeluaran wajib merupakan indikator dari daerah yang sehat secara keuangan.

Pengelolaan keuangan yang efektif sangat penting untuk menjaga kesejahteraan keuangan, karena pemerintah daerah memiliki kapasitas dalam mengelola sumber daya keuangannya (Suryawati et al., 2018). Kesehatan keuangan pemerintah daerah juga mempengaruhi alokasi anggaran pemerintah, sehingga berdampak pada alokasi belanja modal. Kesejahteraan keuangan pemerintah daerah turut memperkuat ketahanan fiskalnya, memungkinkan mereka untuk lebih efektif mengelola dan mengurangi risiko yang terkait dengan ketidakpastian kondisi keuangan di masa depan. Pemerintah daerah dapat dikatakan mandiri secara keuangan dari pemerintah pusat jika mereka memiliki stabilitas keuangan yang kuat. Oleh karena itu, kesehatan keuangan pemerintah daerah memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas investasi modal dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana pengaruh belanja modal dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan kesehatan keuangan sebagai variabel pemoderasi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini hendak menguji beberapa persoalan sebagai berikut.

- 1) Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
- 2) Apakah tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
- 3) Apakah kesehatan keuangan memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
- 4) Apakah kesehatan keuangan memoderasi pengaruh tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian ini hendak menguji beberapa persoalan sebagai berikut:

- 1) Menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah;
- 2) Menguji dan menganalisis pengaruh tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah;
- 3) Menguji dan menganalisis peran moderasi Kesehatan keuangan dalam hubungan antara belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah;
- 4) Menguji dan menganalisis apakah kesehatan keuangan memoderasi pengaruh Tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1) Manfaat teoritis

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada pengaruh belanja modal dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan kesehatan keuangan sebagai variabel pemoderasi. Kemudian diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan serta diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

2) Manfaat bagi Praktisi

- (1) Dari hasil penelitian ini dimaksudkan dapat menambah pengalaman, wawasan dengan membandingkan teori dengan praktik yang terjadi.
- (2) Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan sebagai dasar pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan strategi, kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan.
- (3) Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang selanjutnya dapat dijadikan motivasi dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja keuangan sehingga dapat kualitas Pembangunan infrastruktur dan memperoleh pendapatan daerahnya masing-masing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory atau yang bisa disebut juga Teori Keagenan tercipta karena adanya hubungan antara agen dengan prinsipal. Prinsipal mempercayakan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama mereka, dengan harapan bahwa agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Prinsipal berkewajiban untuk membayar kepada agen untuk layanan atau jasa yang diterima prinsipal. Namun, karena adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan, sering kali muncul konflik antara kedua belah pihak yang berpotensi mengarah pada masalah keagenan (*agency problem*). Baik agen dan/atau prinsipal masing-masing mengharapkan keuntungan maksimal. Agen dan prinsipal juga saling berupaya untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.

Praktik mengenai teori keagenan pada pemerintahan tingkat daerah baru mulai dilaksanakan sejak diterapkannya sistem otonomi daerah pada tahun 1999. Masyarakat bertindak sebagai prinsipal, sedangkan Pemda sebagai agen yang diberi mandat untuk mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien, dan akuntabel. Masalah dalam keagenan bisa muncul apabila pemerintah terlalu cenderung tidak transparan dan inefisien baik dari segi penyusunan APBD sampai dengan realisasi belanja dan

menyajikan laporan keuangan yang wajar karena memiliki keunggulan informasi (asimetri informasi). Akibatnya agen cenderung melakukan *budgetary slack*.

Dalam teori keagenan menyatakan bahwa umumnya agen akan lebih cenderung membenci risiko (*risk averse*) dan bersikap oportunis. Dalam penelitian ini, Pemda sebagai agen bertanggung jawab tidak semata-mata tentang bagaimana anggaran didapat dan dibelanjakan, tetapi juga tentang bagaimana anggaran tersebut dikelola sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Penting untuk menilai kinerja keuangan sebagai indikator sejauh mana Pemda telah menjalankan perannya secara bertanggung jawab terhadap prinsipal (masyarakat). Relevansi antara teori keagenan dengan kinerja keuangan dapat tercermin dari adanya peran pengelolaan Pemda dalam mengambil keputusan fiskal dan dampaknya terhadap performa keuangan yang diwujudkan melalui laporan keuangan yang dilaporkan tiap periodenya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku prinsipal.

2.1.2 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber-sumber daya baik personil, pendanaan, dan beberapa hal lainnya dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Khusaini, 2006). Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya (Adi, 2009). Oleh karenanya, salah satu makna desentralisasi fiskal dalam format penyerahan otonomi di bidang keuangan kepada daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifkasan

peranan dan pemberdayaan daerah dalam pembangunan (Oates, 1972; 2011). Sementara pelaksanaan kebijakan otonomi daerah pada dasarnya merupakan tanggapan atas berbagai aspirasi daerah di Indonesia, yang telah cukup lama menginginkan peningkatan peran dan kemandirian dalam mengelola kewenangan dan tanggung jawabnya untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal didasarkan kepada tujuan pencapaian kemandirian daerah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan daerah serta pelayanan prima kepada masyarakat (Agustina, 2013; Haryanto, 2019; Azimi, 2020). Dengan tercapainya aspek kemandirian tersebut, daerah-daerah akan mampu mengembangkan potensinya dalam kapasitas yang optimal (Litvack dan Seddon, 1999). Kemandirian daerah tersebut akan berdampak positif terhadap penurunan beban ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Daerah diharapkan mampu mengalokasikan sumber dana ini pada sektor-sektor produktif sehingga dapat mendorong peningkatan investasi di daerah dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik serta dapat meningkatkan kontribusi publik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Urip & Indahyani, 2017).

Dalam perkembangannya, desentralisasi fiskal kemudian berkembang menjadi inti dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Bahkan melalui proses desentralisasi fiskal yang bertanggung jawab maka Pemda akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Pengambilan keputusan pada level

pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna ke depannya dalam memenuhi kerangka efisiensi alokasi (Oates, 1993). Namun demikian, transformasi ini tentu membutuhkan persyaratan ketika otonomi yang dijalankan harus betul-betul didefinisikan sebagai otonomi yang menempatkan masyarakat sebagai subjek/pelaku bukan sekadar pemaknaan dalam pengertian wilayah teritorial tertentu di daerah. Karenanya, otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan kewenangan semata, melainkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi daerah (Kaloh, 2002).

Meskipun dianggap menjadi praktik terbaik, tetap terdapat beberapa kelemahan terkait pelaksanaan desentralisasi fiskal. Beberapa kelemahan yang kemungkinan menyertai di antaranya (Sugiyanto, 2000): (1) menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dan daerah miskin; (2) mengancam stabilisasi ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro; (3) mengurangi efisiensi akibat kurang representasinya lembaga perwakilan rakyat dengan indikator masih lemahnya mekanisme publik hearing; dan (4) perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah.

2.1.3 Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Rincian lebih lanjut mengenai belanja modal diuraikan dalam Buletin Teknis 03: Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. Aset tetap mempunyai

ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: 1) berwujud, 2) akan menambah aset pemerintah, 3) mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, 4) nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri/karakteristik Aset Lainnya adalah: 1) tidak berwujud, 2) akan menambah aset pemerintah, 3) mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, 4) nilainya relatif material.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika: a) pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah; b) pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; c) perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Belanja modal berkaitan erat dengan istilah investasi. Halim (2004) menyatakan bahwa kata investasi dapat berarti bermacam-macam, tergantung dari konteks mengartikannya. Dalam bahasa akuntansi pada konteks belanja, investasi dapat timbul dari adanya perbedaan antara *revenue expenditure* dan *capital expenditure*. Dalam membahas belanja modal, maka istilah yang digunakan adalah *capital expenditure* karena memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Sularso dan Restianto, 2011). Dijelaskan lebih lanjut di dalam buletin teknis 04, perolehan Belanja Modal meliputi: belanja modal untuk perolehan tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain. Demikian

juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), harus ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut harus dianggarkan dalam APBN/APBD sebagai Belanja Modal dan bukan sebagai Belanja Operasional. Nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut harus tetap diperhatikan

2.1.4 Tingkat Ketergantungan Daerah

Salah satu sumber penerimaan Pemda selain PAD adalah Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas: (1) Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana APBN yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan antar daerah dengan tujuan membiayai pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi; (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu menandai urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional; (3) Dana Bagi Hasil yaitu dana APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Untuk melihat ketergantungan fiskal pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dan mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, dapat diukur dari seberapa jauh kemampuan pembiayaan bila didanai sepenuhnya oleh PAD dan Bagi Hasil. Mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan indikator Derajat Desentralisasi Fiskal (Musgrave & Musgrave, 1980). Makin tinggi ketergantungan pada pemerintah pusat, maka makin kecil kemungkinan daerah tersebut memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit yang baik. Desentralisasi fiskal secara umum mempengaruhi kemungkinan daerah memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi, khususnya jika dilihat dari aspek kemandirian daerah (Fontanella dan Rossieta, 2014).

2.1.5 Kesehatan keuangan

Kesehatan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kemampuan daerah untuk membiayai operasionalnya dalam melaksanakan pelayanan publik dan memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu ukurannya adalah *financial flexibility*, yaitu kemampuan pemerintah daerah meningkatkan sumber daya keuangannya untuk merespons peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan maupun peningkatan kapasitas utang. Oleh karena itu, indikator dimensi ini harus menunjukkan keseimbangan antara kapasitas pendapatan dan kapasitas utang selama periode keuangan. Pembilang dari rasio ini sebaiknya direpresentasikan oleh kapasitas pendapatan setelah dikurangi pengeluaran

wajib dan/atau pendapatan yang dibatasi penggunaannya, sedangkan penyebutnya direpresentasikan oleh jumlah kewajiban kepada pihak lain. Rasio ini seharusnya menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menutup beban utangnya (Ritonga, 2014).

2.1.6 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Susanto, 2019). Pengukuran kinerja keuangan dapat diwujudkan dalam bentuk rasio keuangan salah satunya melalui kemandirian fiskal daerah, yaitu sejauh mana pendapatan asli daerah (PAD) berkontribusi terhadap total pendapatan atau belanja daerah (Ritonga, 2014). Tingkat kemandirian fiskal yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dari potensi lokal, seperti pajak dan retribusi, yang secara langsung mendukung stabilitas dan keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai Belanja Modal, Ketergantungan Daerah, Kesehatan keuangan, dan Kinerja Keuangan Daerah dapat diringkaskan sebagai berikut.

Table II.1 :
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penulis, Tahun	Variabel	Sampel dan Metode Analisis	Hasil
(Firmansyah et al., 2024)	Variabel Independen: 1. Belanja modal 2. Tingkat Ketergantungan Variabel Dependen: Kinerja keuangan Variabel Pemoderasi: Kesehatan keuangan	Sampel: Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di website www.djpk.go.id per Mei 2023 periode 2016-2021 dan diperoleh sebanyak 630 sampel. Metode analisis: Analisis regresi linear berganda.	1. Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. Kesehatan keuangan tidak memperkuat pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 4. Kesehatan keuangan tidak melemahkan pengaruh negatif Tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
(Purwati & Firmansyah, 2024)	Variabel Independen: 1. Kemandirian daerah 2. Efektivitas PAD 3. Ketergantungan daerah Variabel dependen: Anggaran belanja modal Variabel pemoderasi: Kualitas keuangan daerah	Sampel: Informasi anggaran dan realisasi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Audited dan LHP BPK atas LKPD pada 15 Pemda kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam periode 10 (sepuluh) tahun terakhir atau mulai dari TA 2013 s.d. 2022 dan diperoleh sebanyak 148 sampel.	1. Kemandirian daerah tidak berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. 2. Efektivitas PAD tidak berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. 3. Ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal. 4. Kualitas laporan keuangan tidak dapat memperkuat pengaruh

		Metode analisis: Analisis regresi linear berganda.	<p>kemandirian daerah terhadap belanja modal.</p> <p>5. Kualitas laporan keuangan tidak dapat memperkuat pengaruh positif Efektivitas PAD terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.</p> <p>6. Kualitas laporan keuangan dapat memperkuat pengaruh positif ketergantungan daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.</p> <p>7.</p> <p>8.</p>
(Aziz & Kusumawati, 2024)	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Pemerintah Daerah 2. Tingkat kekayaan 3. Tingkat ketergantungan 4. Pertumbuhan ekonomi 5. Temuan audit <p>Variabel dependen: Kinerja keuangan</p>	<p>Sampel:</p> <p>29 kabupaten dan enam kota di Provinsi Jawa Tengah ditambah empat kabupaten dan satu kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rentang waktu tiga tahun dimulai dari tahun 2020-2022, diperoleh sebanyak 120 sampel.</p> <p>Metode analisis: Analisis regresi linear berganda.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. Tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 4. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
(Digdowiseiso et al., 2022)	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PAD 2. Dana perimbangan 3. Belanja modal <p>Variabel Dependen: Kinerja keuangan</p>	<p>25 kabupaten/kota di Jawa Timur periode tahun 2016-2020 dengan total sampel sebanyak 125 sampel.</p> <p>Metode analisis: Analisis regresi linear berganda.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Dana perimbangan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kinerja

			keuangan pemerintah daerah.
		3.	Belanja modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
(Widajanto et al., 2022)	Variabel Independen: BAB III PAD BAB IV Dana perimbangan BAB V Belanja modal Variabel dependen: Kinerja keuangan	Sampel: 38 kabupaten/kota di Jawa Timur periode 2018-2020 dan diperoleh sebanyak 114 sampel. Metode analisis: Analisis regresi linier berganda.	1. PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
(Aysiah, 2022)	Variabel Independen: 1. Ukuran Pemerintah Daerah 2. Tingkat kekayaan 3. Tingkat ketergantungan 4. Temuan Audit BPK Variabel dependen: Kinerja keuangan	Sampel: 29 kabupaten dan enam kota di Provinsi Jawa Tengah dengan rentang waktu lima tahun dimulai dari tahun 2016-2020 dan diperoleh sebanyak 117 sampel. Metode analisis: Analisis regresi linier berganda.	1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 2. Tingkat kekayaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 3. Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 4. Temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
(Aulia & Rahmawaty, 2020)	Variabel Independen: 1. Kemakmuran pemerintah daerah 2. Ukuran pemerintah daerah	Sampel: 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2014-2018.	1. Kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Tingkat ketergantungan	Metode analisis: Analisis regresi linier berganda.	2. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
Variabel dependen: Kinerja keuangan		3. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada, maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

2.3.1 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Digdowiseiso et al. (2022), Ramadana & Bahgia (2023), dan Simamora & Budiwitjaksono (2022) mengemukakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memperoleh sumber pendapatan lokal daripada hanya mengandalkan pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer dari pemerintah pusat. Salah satu ukuran penting dari efektivitas desentralisasi fiskal di Indonesia adalah kapasitas pemerintah daerah untuk menyusun strategi dan menciptakan PAD, karena kapasitas ini secara langsung mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

H1: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.3.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia selama lebih dari dua dekade seharusnya memberdayakan Pemda untuk memiliki otonomi dalam mengelola tata pemerintahannya. Pemerintah daerah diharapkan tidak lagi bergantung pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan institusinya (Puspita et al., 2021). Pemda harus menunjukkan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan saat menerapkan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan otonomi daerah dalam menghasilkan PAD. Pemda masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber utama pendanaan untuk pembangunan wilayahnya. Meskipun desentralisasi fiskal telah diterapkan di Indonesia selama lebih dari dua dekade, pemerintah daerah yang masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat menghadapi kendala dalam menghasilkan PAD (Puspita et al., 2021). Adinata & Efendi (2022), Digdowiseiso et al. (2022), Firmansyah (2024), dan Novita & Arza (2024) menemukan bahwa tingkat ketergantungan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan dianggap kurang dalam perencanaan pembangunan yang berorientasi pada program-program yang dapat menghasilkan sumber pendanaan. Pemerintah daerah sangat mengandalkan pembayaran transfer dari pemerintah pusat

sebagai sumber pendapatan utama karena tanggung jawab mereka untuk melaksanakan operasional dan menyediakan layanan dasar kepada masyarakat.

H2: Tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.3.3 Kesehatan keuangan Memoderasi Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kesehatan keuangan dapat dilihat sebagai kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan publik dan memenuhi kewajibannya (Kooij & Groot, 2021). Pemda harus memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mampu mendanai penyediaan layanan publik. Desentralisasi fiskal di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan penyediaan layanan kepada masyarakat karena pemda lebih memahami kebutuhan rakyat di wilayah mereka (Sutiyo & Maharjan, 2017). Penyediaan layanan publik memiliki jenis yang sangat beragam, sementara pemda menghadapi keterbatasan sumber pendanaan, sehingga diperlukan penentuan prioritas pengeluaran. Kondisi Indonesia saat ini masih memerlukan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Sukwika, 2018). Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti, terutama karena pemerintah sedang mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebaiknya memprioritaskan alokasi pengeluaran untuk memenuhi layanan dasar, yang biasanya dialokasikan melalui belanja modal.

Alokasi pengeluaran pemerintah meningkat selama krisis ekonomi karena adanya kecenderungan masyarakat ingin mengetahui bagaimana pemerintah memberikan stimulus untuk memperbaiki kondisi ekonomi (Bolívar et al., 2016). Krisis ekonomi sering menyebabkan pemerintah menghadapi kondisi keuangan yang tidak sehat akibat tekanan pendapatan dan meningkatnya kebutuhan pengeluaran. Dengan demikian, kesehatan keuangan menjadi faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, termasuk dalam alokasi belanja modal yang berdampak pada layanan infrastruktur.

Kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat dibuktikan dengan pengelolaan sumber daya keuangan yang efisien. Ketika kondisi keuangan stabil, pemerintah daerah dapat secara efisien mendistribusikan dana untuk memenuhi berbagai kebutuhan layanan publik. Hal ini dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengeluaran. Pemerintah daerah juga terdorong untuk meningkatkan transparansi agar mereka dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan anggaran dan menjaga stabilitas keuangan yang solid. Oleh karena itu, ketika kondisi keuangan lebih menguntungkan, dampak belanja modal terhadap kinerja keuangan menjadi lebih signifikan.

H3: Kesehatan keuangan memperkuat pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah

2.3.4 Kesehatan keuangan Memoderasi Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

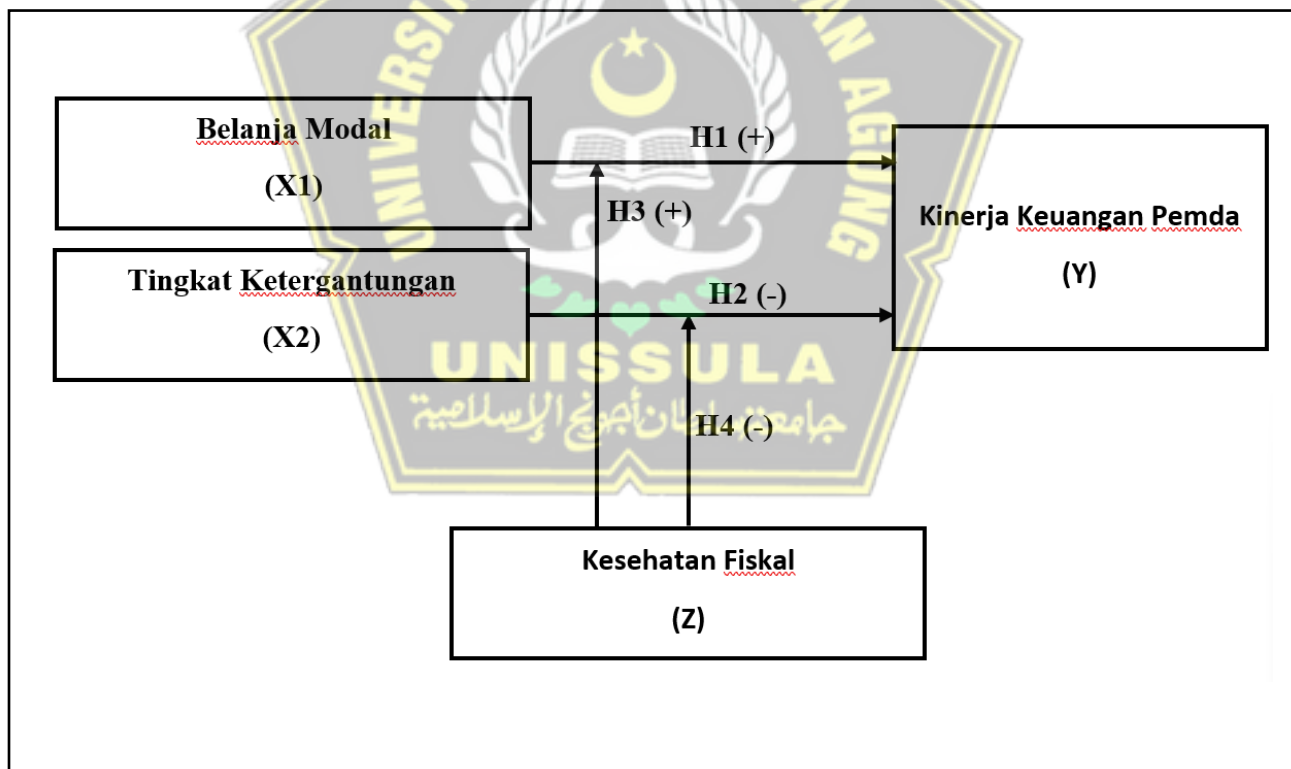
Kondisi keuangan yang sehat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara optimal (Muhtar et al., 2018). Salah satu indikator dari kondisi keuangan yang baik adalah meningkatnya investasi swasta di daerah, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan PAD melalui pajak dan retribusi. Peningkatan PAD ini akan mendorong Pemda untuk meningkatkan kinerja layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Desentralisasi fiskal di Indonesia diterapkan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, dengan harapan Pemda dapat menggali dan mengelola sumber pendapatannya sendiri. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan utama. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa tujuan utama desentralisasi fiskal, yaitu meningkatkan kapasitas fiskal daerah, belum sepenuhnya tercapai.

Kondisi keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangannya. Kondisi keuangan yang kuat berarti pemerintah daerah memiliki pendapatan yang cukup untuk menutupi berbagai pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD ini akan menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik bagi Pemda. Oleh karena itu, Pemda dengan kondisi keuangan yang lebih sehat dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, sehingga memiliki kinerja keuangan yang lebih baik.

H4: Kesehatan keuangan memperlemah pengaruh negatif ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.4 Kerangka Penelitian

Model kerangka penelitian menempatkan Belanja Modal dan Tingkat Ketergantungan pada sebagai variabel independen, kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen, dan Kesehatan keuangan sebagai variabel pemoderasi. Adapun kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar II.1 :
Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif menurut Sugiyono (2022) merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan guna meneliti suatu populasi atau sampel tertentu yang pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk melaksanakan pengujian hipotesis yang sudah ditentukan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *explanatory research*. *Explanatory research* menjelaskan mengenai hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal) (Sugiyono, 2022). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan kesehatan keuangan sebagai variabel pemoderasi.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi menurut (Sugiyono, 2022) merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan peneliti dengan tujuan untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan populasi Pemerintah Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Tengah, sejumlah 29 kabupaten dan 6 kota. Berdasarkan penelitian terdahulu belum ada yang menilai pengaruh belanja modal dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan di pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah oleh karena itu peneliti tertarik mengambil populasi di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan sifat khusus yang dimiliki oleh populasi. Penelitian ini menggunakan Teknik pengambilan sampel sampling jenuh. Sampel jenuh mengambil semua semua populasi sebagai sampel (Sugiyono, 2022). Pada Penelitian ini sampel yang dipilih adalah semua Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan periode tahun observasi 2022-2024.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2022), data sekunder merupakan sumber data yang datanya tidak diberikan langsung kepada pengumpul data melainkan dapat melalui orang lain atau melalui dokumen. Data yang diambil berasal dari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada periode 2022-2024. Data pada penelitian ini didapatkan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada situs <https://djpk.kemenkeu.go.id/>, dan sumber resmi lain yang dapat mendukung penelitian ini.

**Tabel III.1 :
Sampel Penelitian**

Kriteria	Jumlah
Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	35
Tahun Pengamatan (2022-2024)	3
Total Pemerintah Daerah-Tahun	105
Data Outlier	13
Total sampel	92

Sumber: Data diolah, 2025

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Menurut (Sugiyono, 2022), metode dokumentasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang terdapat pada buku, arsip, dokumen, angka, dan gambar beserta format pada sebuah laporan maupun suatu keterangan yang dapat dipergunakan untuk penelitian. Data pada penelitian ini didapatkan dengan cara mengunduh laporan keuangan tahunan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada periode 2022-2024.

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini terdapat tiga variabel, yaitu variabel dependen (Y), variabel independen (X), dan variabel pemoderasi (Z). Variabel independen adalah variabel laten yang variasi nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel laten lain dalam model (Cooper & Schindler, 2014). Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri atas

belanja modal (X1) dan tingkat ketergantungan (X2). Belanja modal diukur dari proporsi gabungan seluruh realisasi belanja yang dialokasikan untuk pengadaan aset tetap, meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya dibandingkan dengan total belanja daerah.

Tingkat ketergantungan diukur dengan rasio ketergantungan daerah yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Penelitian ini menggunakan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio kemandirian sebagai variabel dependen. Rasio ini dapat mencerminkan kondisi pemerintah daerah yang tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri. Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tingkat kesehatan keuangan yang berfokus pada rasio fleksibilitas yang sama dengan yang digunakan Ritonga (2014).

Pada penelitian ini variabel dependennya (Y) adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, variabel independennya (X) terdiri atas belanja modal (X1) dan tingkat ketergantungan (X2), sedangkan variabel pemoderasinya adalah kesehatan

keuangan (Z). Ringkasan definisi operasional dan pengukuran variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.2 :
Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi	Rumus	Skala
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Mengukur kemandirian fiskal	$\frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Transfer Provinsi} + \text{Pinjaman}}$	Rasio
Belanja Modal (X1)	Mengukur proporsi belanja daerah yang digunakan untuk belanja produktif	$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}}$	Rasio
Tingkat Ketergantungan (X2)	Sejauh mana Pemda bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat	$\frac{\text{Realisasi Dana Perimbangan}}{\text{Realisasi PAD}}$	Rasio
Kesehatan Keuangan (Z)	Mengukur kemampuan Pemda menjalankan tanggung jawabnya.	$\frac{\text{Total Pendapatan} - \text{DAK} - \text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Utang}}$ <p>Hasil dari perhitungan di atas kemudian diterjemahkan untuk memperoleh indeks kesehatan keuangan dengan rentang 0-1</p> $\frac{\text{Nilai Aktual} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Nilai maksimum} - \text{Nilai Minimum}}$	Rasio

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang terdiri dari uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji *Goodness of Fit Model*, dan uji hipotesis.

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif dilaksanakan sebelum melaksanakan pengujian terhadap model dan hipotesis. Statistik Deskriptif merupakan statistik yang dipergunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2022). Uji Statistik Deskriptif dilaksanakan guna menganalisis data berdasarkan nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata, nilai median dan nilai standar deviasi dari suatu variabel (Sugiyono, 2022).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum model regresi digunakan dalam pengujian hipotesis, model akan diuji terlebih dahulu menggunakan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model yang diperoleh benar-benar memenuhi asumsi dasar dalam analisis regresi. Uji asumsi klasik dilaksanakan dengan uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas yang akan dilaksanakan pada penelitian ini (Ghozali, 2018).

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini uji normalitas dilaksanakan dengan uji non parametrik *kolmogorov smirnov* (K-S) dengan syarat sebagai berikut:

- Apabila nilai signifikan $> \alpha$ ($\alpha = 0,05$) berarti menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.
- Apabila nilai probabilitas $\leq \alpha$ ($\alpha = 0,05$) berarti menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi tidak normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilaksanakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018). Timbulnya multikolinearitas bisa dilihat dengan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance yang didapatkan dari pengolahan data yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- Apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan $VIF \geq 10$, berarti terjadi gejala multikolinearitas.
- Apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas.

3) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilaksanakan untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) pada model regresi linear (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik merupakan model regresi yang terbebas dari masalah autokorelasi (Ghozali, 2018). Uji Durbin Watson (DW test) dilakukan untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2018). Kriteria dalam pengujiannya adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 :
Kriteria Pengujian Durbin Watson

Hipotesis nol	Keputusan	Apabila
Tidak ada autokorelasi positif	Ditolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Ditolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Diterima	$du < d < 4 - du$

Keterangan:

d = Durbin Watson; du = Durbin Watson upper, dl = Durbin Watson lower

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi (Ghozali, 2018). Apabila *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homokedastisitas, namun apabila berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas merupakan model regresi yang baik (Ghozali, 2018). Uji

heteroskedastisitas dapat dilaksanakan dengan menggunakan uji *Glejser* dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan ketentuan apabila nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun apabila nilai signifikansi $< 0,05$, maka terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilaksanakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini, analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal (X1), Tingkat Ketergantungan (X2), terhadap Kinerja Keuangan (Y), serta Kesehatan keuangan (Z). Dengan analisis ini dapat diketahui arah hubungan antar variabel dependen dengan independent, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan pada penelitian ini berskala rasio. Persamaan umum dalam analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = variabel dependen (Kinerja Keuangan)
- α = konstanta

- β = koefisien regresi
- X_1 = variabel independen (Belanja Modal)
- X_2 = variabel independen (Tingkat Ketergantungan)
- ε = error term

3.6.4 Moderating Regression Analysis (MRA)

Analisis regresi dengan variabel moderator atau MRA dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara Belanja Modal (X_1), Tingkat Ketergantungan (X_2), terhadap Kinerja Keuangan (Y), dengan Kesehatan keuangan (Z) sebagai variabel pemoderasinya. Model penelitian yang digunakan untuk menguji adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha_1 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 (X_1 \times Z) + \beta_4 (X_2 \times Z) + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = variabel dependen (Kinerja Keuangan)
- α = konstanta
- X_1 = variabel independen (Belanja Modal)
- X_2 = variabel independen (Tingkat Ketergantungan)
- ε = error term
- Z = kesehatan keuangan
- $X_1 \times Z$ = interaksi belanja modal dan kesehatan keuangan
- $X_2 \times Z$ = interaksi tingkat ketergantungan dan kesehatan keuangan

- β_4, β_5 = koefisien interaksi

3.6.5 Uji *Goodness of Fit* Model

Keakuratan fungsi regresi sampel dalam memperkirakan nilai sebenarnya dapat diukur melalui *Goodness of Fit*nya (Ghozali, 2018). Secara statistik, paling tidak *Goodness of Fit* dapat diukur melalui nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F. Perhitungan statistik dianggap signifikan apabila nilai uji statistik berada pada daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya, apabila nilai uji statistik berada dalam daerah H_0 yang diterima, maka dianggap tidak signifikan (Ghozali, 2018).

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang dapat dilihat pada *Adjusted R²* (Ghozali, 2018). Variabel independen pada penelitian ini lebih dari dua maka menggunakan *Adjusted R²*. *Adjusted R²* yang menunjukkan angka yang semakin besar yaitu mendekati angka 1, berarti semakin baik model yang digunakan dalam menjelaskan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila *Adjusted R²* semakin kecil yaitu mendekati angka 0 berarti model semakin lemah dalam menjelaskan variabelitasnya dari variabel dependennya (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini berarti seberapa besar perubahan kesehatan keuangan mampu dijelaskan oleh kinerja keuangan, belanja modal, dan tingkat ketergantungan kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

2) Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel independen penelitian berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilaksanakan dengan cara mengukur nilai signifikansi. Pada penelitian ini uji ini digunakan untuk melihat apakah Kinerja Keuangan, Belanja Modal, dan Tingkat Ketergantungan secara bersama-sama mampu mempengaruhi Kesehatan Keuangan di Jawa Tengah. Apabila nilai signifikansi menunjukkan hasil $\leq 0,05$, maka variabel independen bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak dan berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2018).

3.6.6 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah diajukan digunakanlah Uji t. Analisis regresi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial serta untuk mengetahui seberapa besar dominasi variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Metode uji hipotesis yang telah diajukan dilaksanakan melalui pengujian secara parsial.

1) Uji Signifikan parsial (Uji t)

Uji t dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen yaitu belanja modal dan tingkat ketergantungan terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Pengujian ini dilaksanakan dengan cara mengukur nilai signifikansi. pada penelitian ini uji digunakan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan mempengaruhi tingkat ketergantungan, belanja modal mempengaruhi tingkat ketergantungan, kinerja keuangan mempengaruhi tingkat ketergantungan dengan dimoderasi kesehatan keuangan, belanja modal mempengaruhi tingkat ketergantungan dengan dimoderasi kesehatan keuangan. Apabila nilai signifikansi menunjukkan hasil $\leq 0,05$ maka hipotesis yang telah diajukan diterima dan berarti bahwa individual variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak dan berarti bahwa individual variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2018).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Letak dan kondisi geografis Provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa yang secara geografis berada di $5^{\circ}40' - 8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $108^{\circ}30' - 111^{\circ}30'$ Bujur Timur. Panjang garis pantai Jawa Tengah terbentang sejauh 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Provinsi Jawa Tengah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah administrasi yang terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota yang terdapat 573 kecamatan, 750 kelurahan, dan 8.809 desa dimana ibukota di Kota Semarang. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang terluas dengan luas wilayah sebesar 2.138,51 km², sedangkan kabupaten yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kabupaten Kudus dengan luas wilayah sebesar 425,17 km², dan kota yang memiliki luas wilayah terluas dan terkecil yaitu Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 373,67 km² dan Kota Magelang dengan luas wilayah hanya sebesar 18,12 km².

Tabel IV.1 :
Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Banjarnegara	19.	Kab. Pemasang

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 2. Kab. Banyumas | 20. Kab. Purbalingga |
| 3. Kab. Batang | 21. Kab. Purworejo |
| 4. Kab. Blora | 22. Kab. Rembang |
| 5. Kab. Boyolali | 23. Kab. Semarang |
| 6. Kab. Brebes | 24. Kab. Sragen |
| 7. Kab. Cilacap | 25. Kab. Sukoharjo |
| 8. Kab. Demak | 26. Kab. Tegal |
| 9. Kab. Grobogan | 27. Kab. Temanggung |
| 10. Kab. Jepara | 28. Kab. Wonogiri |
| 11. Kab. Karanganyar | 29. Kab. Wonosobo |
| 12. Kab. Kebumen | 30. Kota Magelang |
| 13. Kab. Kendal | 31. Kota Pekalongan |
| 14. Kab. Klaten | 32. Kota Salatiga |
| 15. Kab. Kudus | 33. Kota Semarang |
| 16. Kab. Magelang | 34. Kota Surakarta |
| 17. Kab. Pati | 35. Kota Tegal |
| 18. Kab. Pekalongan | |
-

Populasi dalam penelitian ini yaitu 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sampai 2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, asumsi klasik, teknik analisis regresi berganda, teknik *moderated regression analysis*, uji kelayakan model dan uji parsial. Untuk teknik pengambilan sampel digunakan sampling jenuh seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah dengan dengan pengecualian terhadap data yang teridentifikasi sebagai outlier. Rinciannya adalah sebagai berikut.

**Tabel IV.2 :
Uraian Sampel Penelitian**

Kriteria	Jumlah
Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	35
Tahun Pengamatan (2022-2024)	3
Total Pemerintah Daerah-Tahun	105
Data Outlier	19
Total sampel	86

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel IV.2, jumlah kabupaten kota di Jawa Tengah yang menjadi sampel penelitian sebanyak 35 daerah. Dengan periode penelitian selama tiga tahun, yaitu 2022-2024, dan mengeluarkan 19 data outlier, total sampel yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 86.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

Metode pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model regresi berganda. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen (Kinerja Keuangan) terhadap variabel dependen (Belanja Modal dan Tingkat Ketergantungan) dengan adanya variabel moderasi (Tingkat Kesehatan Keuangan).

4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai

maksimum, dan standar deviasi (*standard deviation*). Nilai minimum menunjukkan bahwa terdapat nilai terkecil yang diperoleh dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan terhadap sampel penelitian ini, nilai maksimum menunjukkan bahwa terdapat nilai terbesar yang diperoleh dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan terhadap sampel penelitian ini, nilai rata-rata (*mean*) menunjukkan bahwa terdapat nilai rata-rata dari setiap variabel yang telah dilakukan terhadap sampel penelitian. Tabel IV.3 Berikut merupakan hasil analisis deskriptif variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel IV.3 :
Hasil Analisis Deskriptif Statistik
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Modal	92	0.0482	0.2708	0.1240	0.03814
Tingkat Ketergantungan	92	1.8009	5.8905	3.4238	0.84207
Kinerja Keuangan	92	0.1298	0.4336	0.2355	0.06463
Kesehatan Keuangan	92	0.00	1.00	0.2410	0.18539
Valid N (<i>listwise</i>)	92				

Sumber: Data diolah, 2025

Berikut merupakan penjabaran hasil statistik deskriptif variabel penelitian.

1) Variabel Independen Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh

pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Hasil analisis deskriptif variabel Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022-2024 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1240 dan simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 0,03814. Nilai minimum adalah sebesar 0,0482 diperoleh dari Kabupaten Purbalingga tahun 2024 dan nilai maksimum sebesar 0,2708 dari Kabupaten Boyolali tahun 2022.

2) Variabel Independen Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan mengukur ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hasil analisis deskriptif variabel tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun anggaran 2022-2024 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,4238 dan simpangan baku (*standard deviation*) 0,84207. Nilai minimum dan maksimum masing-masing adalah 1,8009 diperoleh dari Kabupaten Boyolali tahun 2023 dan 5,8905 diperoleh dari Kabupaten Wonogiri tahun 2023.

3) Variabel Dependen Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hasil analisis deskriptif variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022-2024 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2355 dan simpangan baku (*standard deviation*) 0,06463. Nilai minimum dan maksimum masing-masing adalah 0,1298

dan 0,4336. Kinerja keuangan terendah ditunjukkan oleh Kabupaten Wonogiri tahun 2023 dan tertinggi ditunjukkan oleh Kota Salatiga tahun 2024.

4) Variabel Moderasi Kesehatan Keuangan

Kesehatan keuangan mencerminkan kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban baik jangka panjang maupun jangka pendek. Hasil analisis deskriptif variabel Kesehatan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022-2024 menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2410 dengan simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 0,18539. Nilai minimum sebesar 0 ditunjukkan oleh Kabupaten Banyumas tahun 2022, sedangkan nilai maksimum sebesar 1 ditunjukkan oleh Kabupaten Klaten tahun 2022.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Pada proses proses uji asumsi klasik dilakukan dengan beberapa proses transform data. Jika uji asumsi klasik tidak terpenuhi, hal tersebut akan menyebabkan bias pada hasil penelitian. Uji asumsi klasik yang akan diuji adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel-variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik. Test statistik yang

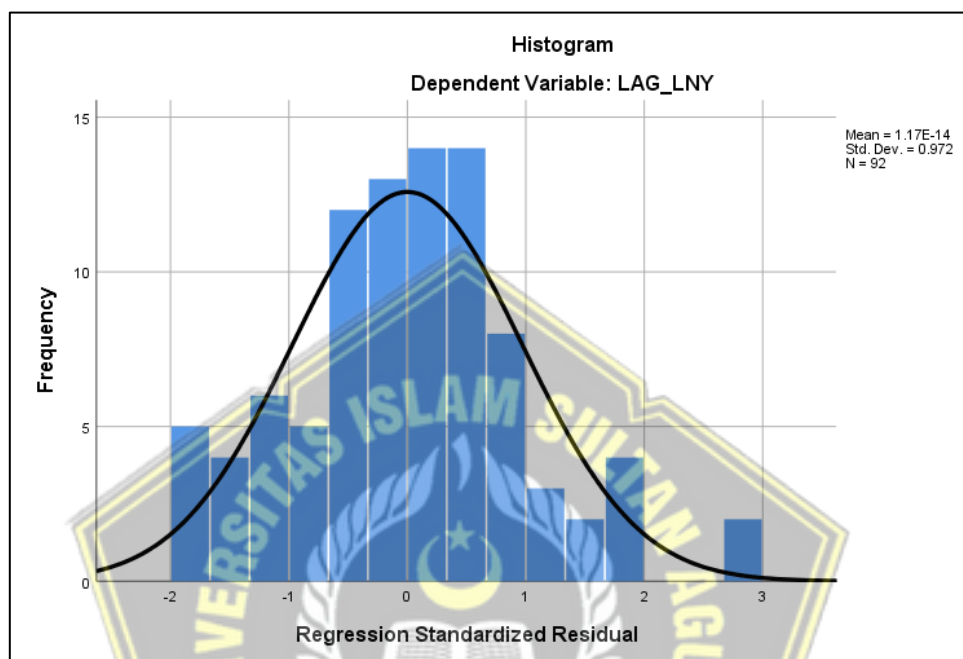
digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov test. Hasil pengujian diperoleh dalam tabel sebagai berikut.

Tabel IV.4 :
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.04001277
Most Extreme Differences	Absolute	0.055
	Positive	0.055
	Negative	-0.039
Test Statistic		0.055
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

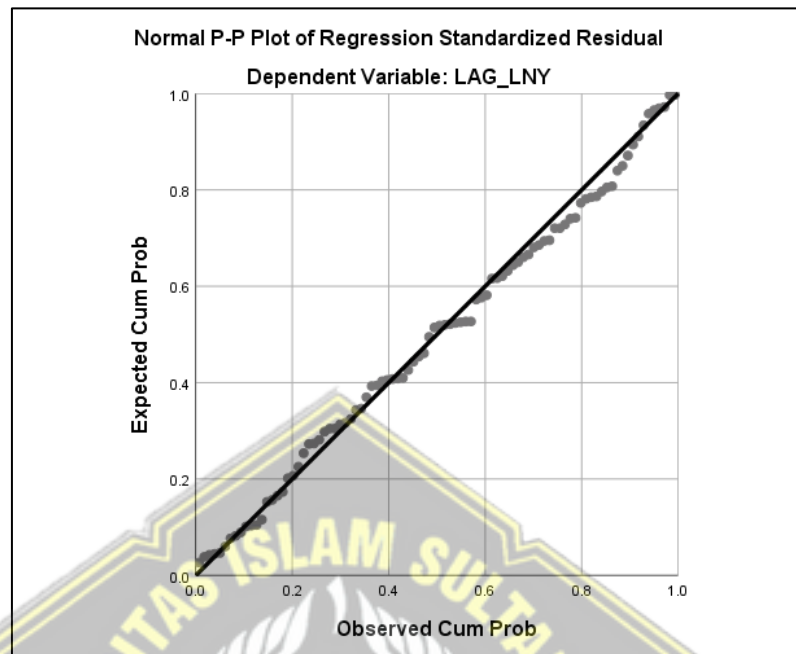
Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* (K-S) diketahui nilai Asymp. Sig. (2- tailed) sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikannya yaitu sebesar 0,05. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal. Adapun uji normalitas yang dilakukan melalui analisis grafik *Normal Probability (P-P) Plot* dan Histogram, melalui grafik-grafik tersebut akan terlihat penyebaran titik-titik data pada sumbu diagonal grafik *Normal Probability (P-P) Plot* serta pada grafik kurva yang ada pada Histogram. Jika titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan kurva mengikuti

arah garis diagonal dan kurva, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pola data terdistribusi normal. Berikut adalah hasil uji Histogram.



Gambar IV.1 :
Hasil Uji Histogram

Dapat dilihat pada gambar bahwa grafik histogram menggambarkan bentuk yang simetris, maka grafik pada penelitian ini merupakan data yang terdistribusi normal. Selain grafik histogram, berikut adalah grafik *Normal Probability (P-P) Plot*.



Gambar IV.2 :
Hasil Uji P-Plot

Pada gambar 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dan berhimpit di sekitar garis diagonal linier. Artinya, semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, data berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji model regresi apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Metode yang digunakan untuk mendeteksi uji multikolinearitas antar variabel bebas (independen) adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Tolerance. Multikolinearitas terjadi apabila nilai Tolerance $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 , hal

tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas. Berikut hasil uji multikolinearitas tersaji pada tabel.

**Tabel IV.5 :
Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients ^a		
		Collinearity Statistics
Model		Tolerance VIF
1	X1	0.897 1.115
	X2	0.908 1.101
	Z	0.915 1.093
	X1.Z	0.812 1.232
	X2.Z	0.959 1.043
a. Dependent Variable: Y		

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas dalam model regresi, sehingga tidak ada korelasi antar variabel bebas. Dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi syarat multikolinieritas.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Model regresi yang baik, tidak terjadi autokorelasi. Pada penelitian ini menggunakan Uji Durbin Watson (DW test), yang akan didapatkan nilai DW hitung (d) dan nilai DW tabel (dL dan dU).

**Tabel IV.6 :
Hasil Uji Autokorelasi**

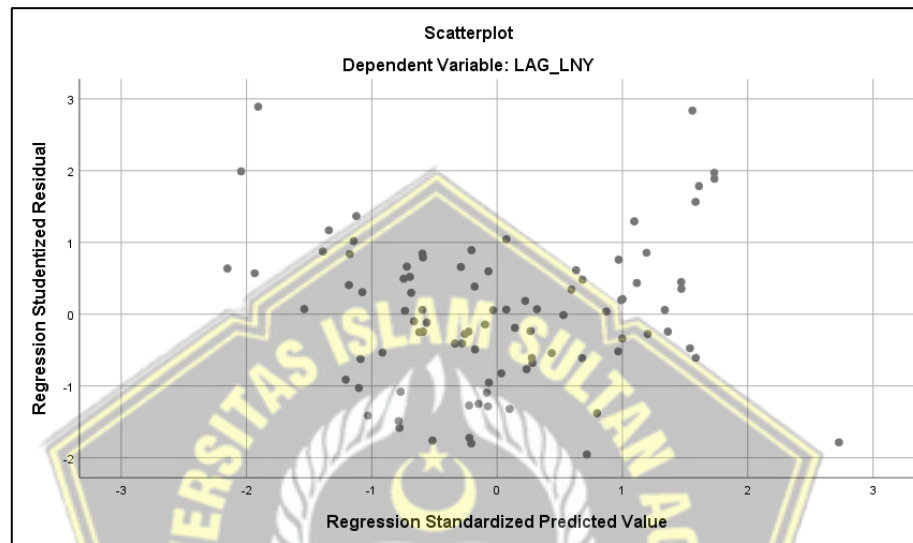
Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.989 ^a	0.978	0.977	0.04116	1.962
a. Predictors: (Constant), X2,Z, Z, X1, X2,X1.Z					
b. Dependent Variable: Y					

Hasil uji autokorelasi tersebut dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi sebesar 5%, dengan jumlah sampel sebanyak 92 ($n=92$), dan jumlah variabel independen sebanyak 5 variabel ($k=5$). Suatu model akan dikatakan bebas dari autokorelasi jika nilai DW masuk dalam kriteria $dU < DW < 4-dU$. Berdasarkan tabel, nilai uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson sebesar 1,962 yang berada di antara $dU = 1,7767$ dan $4-dU = 2,2233$. Dengan demikian model regresi tidak terjadi autokorelasi.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya

SRESID. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar IV.3 :
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dapat dilihat pada gambar terdapat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas dan tersebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal tersebut menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Kemudian untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji glejser yaitu dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan nilai $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas dan apabila nilai $\text{sig} < 0,05$ maka terdapat indikasi heteroskedastisitas. Hasil uji glejser diperoleh sebagai berikut.

**Tabel IV.7 :
Hasil Uji Glejser**

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.031	0.019		1.623	0.108
X1	0.003	0.010	0.035	0.309	0.758
X2	0.001	0.011	0.006	0.055	0.956
Z	0.013	0.013	0.106	0.950	0.345
X1.Z	0.013	0.045	0.035	0.295	0.769
X2.Z	-0.047	0.049	-0.105	-0.971	0.334

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan tabel pada kolom sig diperoleh nilai signifikansi $> 0,05$ untuk tiap variabel independen sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji glejser tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas.

4.2.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Penulis menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dan dependen terhadap satu sama lain dan apakah terdapat hubungan sebab akibat di antara keduanya. Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2022 sampai dengan 2024 menjadi subjek penelitian ini. Digunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh belanja modal dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan

Tabel IV.8 :
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0.173	0.032		-5.389	0.000
X1	0.003	0.016	0.004	0.197	0.844
X2	-1.043	0.019	-0.985	-55.053	0.000
a. Dependent Variable: Y					

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = -0,173 + 0,003X_1 - 1,043X_2 + \varepsilon$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

- 1) Besar nilai konstanta regresi α adalah -0,173 menunjukkan jika variabel independen belanja modal dan tingkat ketergantungan bernilai konstan atau sama dengan nol, maka variabel dependen kinerja keuangan akan bernilai sebesar -0,173.
- 2) Besar nilai koefisien belanja modal (X1) adalah 0,003 dengan nilai positif. Artinya setiap naiknya belanja modal sebesar 1% maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar 0,003X₁ dengan asumsi semua variabel independen konstan.
- 3) Besar nilai koefisien tingkat ketergantungan (X2) adalah -1,043 dengan nilai negatif. Artinya setiap naiknya belanja modal sebesar 1% maka kinerja keuangan

akan menurun sebesar $-1,043X_2$ dengan asumsi semua variabel independen konstan.

4.2.4 Hasil *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Penulis menggunakan metode MRA untuk menguji peran variabel moderasi dalam mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Metode ini memungkinkan untuk diketahuinya apakah variabel moderasi mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi dibentuk melalui perkalian antara belanja modal dengan kesehatan keuangan ($X1.Z$) serta tingkat ketergantungan dengan kesehatan keuangan ($X2.Z$). Nilai koefisien dan tingkat signifikansi dari interaksi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah kesehatan keuangan berperan sebagai moderasi dalam model penelitian.

Tabel IV.9 :
Hasil Uji MRA

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0.175	0.031		-5.728	0.000
X1	0.017	0.016	0.018	1.065	0.290
X2	-1.021	0.018	-0.965	-57.395	0.000
Z	0.008	0.021	0.006	0.382	0.704
X1.Z	0.282	0.074	0.068	3.834	0.000
X2.Z	-0.189	0.079	-0.039	-2.403	0.018

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan uji MRA pada tabel di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = -0,175 + 0,017X_1 - 1,021X_2 + 0,282(X_1 \times Z) - 0,189(X_2 \times Z) + \varepsilon$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

- 4) Nilai koefisien regresi β_3 yaitu interaksi antara $X_1.Z$ adalah 0,282 dengan nilai positif. Artinya kesehatan keuangan sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh variabel belanja modal terhadap kinerja keuangan atau pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan dimoderasi oleh kesehatan keuangan.
- 5) Nilai koefisien regresi β_4 yaitu interaksi antara $X_2.Z$ adalah -0,189 dengan nilai negatif. Artinya kesehatan keuangan sebagai variabel moderasi memperlemah pengaruh variabel tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan atau pengaruh tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan dimoderasi oleh kesehatan keuangan.

4.2.5 Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

1) Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen (kinerja keuangan). Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R^2 semakin kecil, artinya kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin terbatas.

Tabel IV.10 :
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) tanpa Interaksi Variabel Moderasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.986 ^a	0.972	0.971	0.04588
a. Predictors: (Constant), X2, X1				
b. Dependent Variable: Y				

Berdasarkan tabel, diperoleh nilai *adjusted R square* adalah 0,971. Angka ini digunakan untuk melihat besar kontribusi variabel X1 dan X2 (belanja modal dan tingkat ketergantungan) terhadap variabel Y (kinerja keuangan) sebesar $KD = R^2 \times 100\% = 0,971 \times 100\% = 97,1\%$ sedangkan sisanya $100\% - 97,1\% = 2,9\%$ diperoleh oleh faktor lain. artinya, variabel kinerja keuangan yang dapat diterangkan menggunakan belanja modal dan tingkat ketergantungan adalah sebesar 97,1% sementara pengaruh sebesar 2,9% disebabkan oleh variabel lainnya yang ada di luar model ini.

Tabel IV.11 :
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) dengan Interaksi Variabel Moderasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.989 ^a	0.978	0.977	0.04116
a. Predictors: (Constant), X2.Z, Z, X1, X2, X1.Z				
b. Dependent Variable: Y				

Berdasarkan tabel, diperoleh nilai *adjusted R square* adalah 0,977. Angka ini digunakan untuk melihat besar kontribusi variabel X1 dan X2 (belanja modal dan tingkat ketergantungan) dengan Z (kesehatan keuangan) sebagai variabel moderasi terhadap variabel Y (kinerja keuangan) sebesar $KD = R^2 \times 100\% = 0,971 \times 100\% = 97,7\%$ sedangkan sisanya $100\% - 97,7\% = 2,3\%$ diperoleh oleh faktor lain.

Berdasarkan hasil koefisien determinasi persamaan 1 dan persamaan 2, nilai *adjusted R²* persamaan 1 sebesar 0,971 meningkat menjadi 0,977 pada nilai *adjusted R²* persamaan 2. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan keuangan sebagai variabel moderasi dapat meningkatkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

2) Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengaruh semua variabel independen yang terdapat dalam model secara bersamaan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan adalah dengan cara melihat nilai signifikansi dan membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} . Hipotesis diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

dan nilai $\text{sig} \leq 0,050$, sebaliknya hipotesis akan ditolak apabila $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}}$ dan nilai $\text{sig} > 0,050$. Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) dengan menggunakan SPSS versi 25 diperoleh output sebagai berikut.

Tabel IV.12 :
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) tanpa Interaksi Variabel Moderasi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.410	2	3.205	1522.697	.000 ^b
	Residual	0.187	89	0.002		
	Total	6.598	91			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						

Berdasarkan tabel, diperoleh nilai $\text{sig } 0,000 \leq 0,0050$ dan nilai $F_{\text{hitung}} (1522,6697) > F_{\text{tabel}} (3,947)$. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel belanja modal dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal dan tingkat ketergantungan dapat digunakan untuk menerangkan variabel kinerja keuangan.

Tabel IV.13 :
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) dengan Interaksi Variabel Moderasi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.452	5	1.290	761.708	.000 ^b
	Residual	0.146	86	0.002		
	Total	6.598	91			
a. Dependent Variable:Y						

b. Predictors: (Constant), X2.Z, Z, X1, X2,X1.Z

Berdasarkan tabel, diperoleh nilai sig $0,000 \leq 0,0050$ dan nilai Fhitung $(761,708) > F_{tabel} (2,473)$. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel belanja modal dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan dengan kesehatan keuangan sebagai variabel moderasi diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal, tingkat ketergantungan, dan kesehatan keuangan dapat digunakan untuk menerangkan variabel kinerja keuangan.

3) Uji Hipotesis secara Parsial (Uji-t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel bebas terhadap variasi variabel terikat. Uji signifikansi parameter secara individual (parsial) menjadi dasar pengambilan keputusan jika probabilitas pada setiap variabel independen sebesar $<0,05$. Artinya, terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel Belanja Modal dan Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan. Hasil uji-t adalah sebagai berikut.

Tabel IV.14 :
Hasil Uji Hipotesis secara Parsial (Uji-t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-0.175	0.031		-5.728	0.000

X1	0.017	0.016	0.018	1.065	0.290
X2	-1.021	0.018	-0.965	-57.395	0.000
Z	0.008	0.021	0.006	0.382	0.704
X1.Z	0.282	0.074	0.068	3.834	0.000
X2.Z	-0.189	0.079	-0.039	-2.403	0.018
a. Dependent Variable: Y					

- a. H1: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Nilai koefisien variabel Belanja Modal sebesar 0,017 dengan nilai signifikansi 0,290 > 0,05 (lebih dari 0,05) menunjukkan bahwa Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya, semakin besar realisasi belanja modal pemerintah daerah tidak selalu diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan. Oleh karena itu, hipotesis **H1 ditolak**.

- b. H2: Tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Nilai koefisien variabel Tingkat Ketergantungan sebesar -1,021 dengan nilai signifikansi 0,000 > 0,05 (kurang dari 0,05) menunjukkan bahwa Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya, jika tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat semakin tinggi, maka kinerja keuangan pemerintah daerah cenderung menurun. Oleh karena itu, hipotesis **H2 diterima**.

- c. H3: Tingkat Kesehatan Keuangan memoderasi hubungan antara belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah

Nilai koefisien variabel Belanja Modal yang dimoderasi oleh Tingkat Kesehatan Keuangan sebesar 0,282 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa Tingkat Kesehatan Keuangan mampu memperkuat pengaruh positif Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, semakin baik kemampuan suatu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan mengelola pembangunan infrastruktur akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, **H3 diterima.**

- d. H4: Tingkat kesehatan keuangan memoderasi hubungan antara tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Nilai koefisien variabel Tingkat Ketergantungan yang dimoderasi oleh Tingkat Kesehatan Keuangan sebesar -0,189 dengan nilai signifikansi $0,018 < 0,05$ menunjukkan Kesehatan Keuangan secara signifikan memoderasi hubungan antara Tingkat Ketergantungan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, tingkat ketergantungan dapat lebih dikontrol sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah dapat meningkat. Oleh karena itu, **H4 diterima.**

**Tabel IV.15 :
Ringkasan Hasil Hipotesis**

Hipotesis	Hasil
H1: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	Ditolak
H2: Tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	Diterima
H3: Kesehatan Keuangan memoderasi hubungan antara belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah	Diterima
H4: Kesehatan keuangan memoderasi hubungan antara tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah	Diterima

4.3 Pembahasan

4.3.1 Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Menurut hasil penelitian, pengaruh variabel Belanja Modal terhadap kinerja keuangan adalah positif tetapi tidak signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fernandes & Putri (2022), Padang & Padang (2023), dan Wahyudin (2020) yang menyatakan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap

Kinerja Keuangan namun tidak signifikan. Dengan kata lain, Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal yang dilakukan Pemerintah Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan investasi untuk menambah aset tetap, seperti pembangunan infrastruktur, gedung-gedung pemerintah, maupun sarana prasarana publik lainnya. Aset tetap yang dimiliki daerah tersebut kedepannya diharapkan mampu menghasilkan sumber pendapatan dalam jangka panjang. Tersedianya infrastruktur yang memadai akan mendorong produktivitas masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian. Peningkatan aktivitas ekonomi berimplikasi pada peningkatan PAD yang akan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Namun demikian, dampak tersebut seringkali baru bisa dirasakan dalam jangka waktu panjang. Belanja modal pada umumnya berfokus pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur yang mana diperlukan waktu lama untuk menghasilkan manfaat ekonomi, sehingga dampaknya terhadap kinerja keuangan tidak bisa langsung terlihat. Sulit untuk menangkap secara menyeluruh pengaruh belanja modal terhadap Kinerja Keuangan dalam penelitian jangka pendek, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan adalah efektivitas pemanfaatan belanja modal itu sendiri. Tidak semua realisasi belanja modal daerah diarahkan untuk menambah aset produktif yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi. Apabila belanja modal tidak digunakan untuk menambah sarana ekonomi produktif,

maka belanja tersebut tidak akan banyak memicu aktivitas ekonomi. Akibatnya, potensi daerah untuk memperluas sumber-sumber pendapatan tidak optimal sehingga dampaknya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi tidak signifikan.

Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Dalam praktiknya, terdapat potensi konflik kepentingan antara masyarakat (prinsipal) sebagai pihak yang memberikan mandat dengan pemerintah daerah (agen) sebagai pihak yang mengelola sumber daya publik. Pemerintah daerah sebagai agen tidak selalu mengalokasikan belanja modal berdasarkan orientasi ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan politis, kapasitas pengelolaan, dan arah perencanaan. Akibatnya, realisasi belanja modal tidak sepenuhnya menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal bagi peningkatan kinerja keuangan daerah.

4.3.2 Tingkat Ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Menurut hasil penelitian, Tingkat Ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah et al. (2024), Digdowiseiso et al. (2022), dan Aysiah (2022). Tingkat ketergantungan digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD. Rasio tingkat ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menggali sumber PAD. Apabila sumber pendanaan

pemerintah daerah terlalu bergantung kepada transfer pusat, fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan di daerahnya akan terganggu karena sebagian besar belanja daerah terikat pada aturan penggunaan dana transfer. Akibatnya, ruang fiskal untuk melakukan inovasi kebijakan menjadi terbatas sehingga kinerja keuangan tidak tumbuh optimal.

Tingginya tingkat ketergantungan juga mengindikasikan bahwa intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah belum diimplementasikan secara optimal. Optimalisasi pajak serta retribusi daerah bukan hanya tentang peningkatan penerimaan melainkan juga terkait efektivitas tata kelola pemungutan dan pengelolaan penerimaan daerah. Daerah yang mampu mengelola pajaknya dengan baik akan memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat dan ruang otonomi anggaran yang lebih luas, sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat (Hidayah et al., 2025). Keberhasilan pengelolaan pajak dan retribusi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh potensi ekonomi daerah tetapi juga kualitas aparatur, transparansi sistem, dan dukungan regulasi. Penting bagi Pemerintah pusat untuk memberikan dukungan yang tepat kepada daerah antara lain melalui regulasi dan insentif yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan aparatur, dan penyediaan sistem informasi terintegrasi. Selain itu penting adanya mekanisme pembagian hasil pajak yang adil antara pusat dan daerah untuk mendorong tercapainya kemandirian fiskal.

Dalam teori keagenan, tingginya tingkat ketergantungan dapat menimbulkan permasalahan hubungan antara prinsipal (pemerintah pusat maupun masyarakat sebagai pemberi mandat) dan agen (pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan publik). Apabila pemerintah daerah hanya mengandalkan dana transfer pusat, akan terjadinya asimetri. Pemerintah daerah akan cenderung kurang termotivasi untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah karena merasa kebutuhan fiskalnya sudah dipenuhi oleh transfer pusat. Hal ini berpotensi menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan karena beban pertanggungjawaban secara politik dan ekonomi kepada masyarakat menjadi berkurang.

4.3.3 Tingkat Kesehatan Keuangan memoderasi hubungan antara belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah

Kesehatan Keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan memenuhi kewajibannya (Kooij & Groot, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan keuangan sebagai variabel moderasi mampu memperkuat pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan. Daerah dengan kondisi keuangan yang sehat memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai investasi produktif. Sebaliknya, daerah dengan tingkat kesehatan keuangan yang rendah memiliki fleksibilitas anggaran yang sempit karena pendapatannya difokuskan untuk belanja pegawai dan kewajiban rutin lainnya. Hal tersebut membuat belanja modal menjadi tidak optimal karena keterbatasan anggaran untuk melakukan pemeliharaan, pengembangan, maupun pengelolaan aset yang

dibangun. Meskipun belanja modal dilakukan, dampaknya terhadap kinerja keuangan tidak akan signifikan.

4.3.4 Kesehatan Keuangan memoderasi hubungan antara tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan keuangan sebagai variabel moderasi mampu melemahkan pengaruh negatif tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan. Kondisi keuangan yang sehat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber dayanya. Pemerintah daerah dengan kondisi keuangan yang sehat mampu menjaga stabilitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi dana transfer. Meskipun tingkat ketergantungan tinggi, dengan adanya kemampuan untuk mengendalikan belanja rutin dan kapasitas untuk memanfaatkan sumber pendapatan di luar transfer pusat, risiko penurunan kinerja keuangan akibat ketergantungan dapat diminimalisasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan menggunakan alat statistik SPSS versi 25 dan analisis hasil yang telah dijabarkan pada bab 4, maka diperoleh simpulan penelitian sebagai berikut.

1. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uji-t, belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemungkinan belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Dampak positif dari belanja modal umumnya baru bisa dirasakan dalam jangka panjang sehingga sulit untuk tercermin dalam kinerja keuangan jangka pendek.
2. Tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Semakin tinggi tingkat ketergantungan APBD terhadap dana perimbangan maka kinerja keuangan cenderung menurun. Tingginya ketergantungan fiskal menandakan rendahnya kemampuan daerah untuk mengoptimalkan sumber pembiayaannya sendiri sehingga ruang gerak fiskal menjadi terbatas.
3. Kesehatan keuangan berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh positif belanja modal terhadap kinerja keuangan. Daerah dengan tingkat kesehatan keuangan yang baik akan memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk mengoptimalkan belanja modal. Kondisi fiskal yang sehat dapat dilihat dari

adanya ruang fiskal setelah dikurangi belanja dan kewajiban rutin, sehingga belanja dapat diarahkan pada investasi rutin yang berdampak positif pada perekonomian daerah,

4. Kesehatan keuangan berperan sebagai variabel moderasi yang melemahkan pengaruh negatif tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan. Kondisi keuangan yang sehat dapat menekan dampak negatif ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengendalian belanja rutin, menjaga stabilitas fiskal, dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan di luar transfer pusat.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu obyek penelitian hanya terbatas pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2022-2024. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada obyek di luar daerah penelitian karena memiliki karakteristik yang berbeda. Di samping itu, penelitian ini juga tidak dapat menangkap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka panjang karena periode penelitian yang relatif singkat

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah daerah, disarankan untuk memberikan perhatian lebih terhadap komponen pengalokasian belanja modal guna meningkatkan produktivitas daerah yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas kinerja keuangan. Selain itu,

diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan faktor belanja modal, tingkat ketergantungan, dan kesehatan keuangan daerah yang terbukti memberikan pengaruh pada kinerja keuangan.

2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan ruang lingkup penelitian dengan memperluas cakupan wilayah penelitian, menggunakan periode waktu yang lebih panjang, dan menambah variabel lain agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan representatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022). Pengaruh leverage, ukuran pemerintahan daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(2), 1–14. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4477>
- Adi, Priyo Hari. (2009). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Kualitas Pembangunan Manusia. The 3rd National Conference UKWMS, Surabaya
- Agustina, O.A. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007–2011). Skripsi: Universitas Brawijaya
- Atmoko, C. A., & Khairudin, K. (2022). Dampak pendapatan daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 291–296. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1295>
- Aulia, R., & Rahmawaty, R. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584–598. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16826>
- Aysiah, I. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Aziz, A., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Pertumbuhan Ekonomi, dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 6984–6995.
- Bolívar, M. P. R., Galera, A. N., Muñoz, L. A., & Muñoz, L. A. (2016). Risk factors and drivers of financial sustainability in local government: an empirical study. *Local Government Studies*, 42(1), 29–51. <https://doi.org/10.1080/03003930.2015.1061506>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business Research Methods* (12th ed.). Mc Graw-Hill Education.

- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 4(6).
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020. *Jurnal Revenue*, 3(1), 198–209. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.102>
- Firmansyah, A., Arfiansyah, Z., & Huda, A. M. (2024). The Characteristics And Financial Performance Of Local Governments In Indonesia: The Moderating Role Of Financial Health Level. *Accounting Analysis Journal*, 13(2), 85–94. <https://doi.org/10.15294/aaj.v13i2.1894>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Halim, A. (2004). Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah (Ed. Rev.). *UPP AMP YKPN*.
- Halim, K. I. (2021). Pengaruh Leverage, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit Going Concern. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(1), 164–173. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.348>
- Hidayah, A. W., Hendriani, F. P., Ramadhanti, S., & Pangestoeti, W. (2025). *Optimalisasi Penerimaan Negara di Tengah Kesenjangan Kepatuhan Pajak: Analisis Kritis terhadap Strategi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak*. 2.
- Khusaini, M. (2006). *Ekonomi publik: Desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah*. Malang BPFE UNIBRAW.
- Kooij, J., & Groot, T. (2021). Towards a comprehensive assessment system of local government fiscal health. *Maandblad Voor Accountancy En Bedrijfseconomie*, 95(7/8), 233–244. <https://doi.org/10.5117/mab.95.67693>
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390–399. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Muhtar, M., Sutaryo, S., & Suryanto, M. (2018). Towards regional sustainable development via government financial transparency: Evidence from Indonesia.

- Journal of Security and Sustainability Issues*, 7(4), 753–767.
[https://doi.org/10.9770/jssi.2018.7.4\(12\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2018.7.4(12))
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(6), 1–17.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4056/>
- Novita, R., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera Tahun 2021. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 430–443.
<https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1367>
- Nuryani, N., & Firmansyah, A. (2020). Determinants of transparency in financial management on local government websites: Evidence from Indonesia. *Humanities and Social Sciences Letter*, 8(2), 145–155.
<https://doi.org/10.18488/journal.73.2020.82.145.155>
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 303–318. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2985>
- Purwati, Y. E., & Firmansyah, A. (2024). Peran Moderasi Kualitas Laporan Keuangan dalam Hubungan Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal. *Owner*, 8(4).
<https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2389>
- Puspita, D., Raharja, Y. M., Hadi, S., Prasetya, F., Chalil, T. M., & Merita, P. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Badan Keuangan Fiskal Kementerian Keuangan.
- Ramadana, S. W., & Bahgia, S. (2023). Determinansi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831–1840.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Ritonga, I. T. (2014). Developing A Measure Of Local Government's Financial Condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*.
- Setiani, I., & Ismunawan, I. (2022). Pengaruh pengangguran pertumbuhan ekonomi kemiskinan dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 261–276.
<https://www.bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/2201>

- Simamora, W. C., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 410–415. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.547>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukwika, T. (2018). Peran pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>
- Suryawati, D., Suryono, A., Saleh, C., & Muluk, M. R. K. (2018). Fiscal health in local government based on soft system. *Jejak*, 11(2), 224–243. <https://doi.org/10.15294/jejak.v11i2.16048>
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). Decentralization and Rural Development in Indonesia. *Springer*. https://doi.org/10.1007/978981-10-3208-0_8
- Wahyudin, I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.
- Widajanto, M. B., Dewi, P. P., & Anggraeni, Rr. F. D. A. (2022). The Influence of Regional Original Revenues, Balancing Funds and Capital Expenditures on the Financial Performance of Regency/City Regional Governments of East Java Province. *Indonesia Accounting Research Journal*, 10(2), 40–47. <https://doi.org/10.35335/iarj.v10i2.7>